



Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Perekonomian melalui BUMDes Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari

Widya Manurung¹, Emiel Salim Siregar², Irfan Islami Rambe³, Aldi Ardiansyah Siagian⁴, Noverina Fithrian Ramadhani⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: wudyabelakang@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: islamirambe86@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: aldisiagian8@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Email: noverinaramadhani41@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Peran Pemerintah Desa;
Pembangunan Ekonomi; BUMDes;
Pemberdayaan Ekonomi.

ABSTRACT

This research explores the strategic role of the Village Government in supporting village economic development through the management of Anugerah Mandiri Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Mekar Sari Village. BUMDes Anugerah Mandiri acts as the driving force of the village economy with the aim of improving community welfare, creating jobs, and maximizing the potential of local resources. In this research, the focus is on various aspects of the Village Government's role, such as its role as a facilitator in the establishment of BUMDes, management of village assets, provision of regulatory support, and capacity building of human resources. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with village officials, BUMDes administrators, and community members, as well as direct observation of BUMDes operations. The results show that the active involvement of the Village Government in the planning, management, and capacity building of BUMDes has a significant impact on local economic growth. However, challenges such as limited human resources and capital are still obstacles in optimizing the role of BUMDes. Therefore, a stronger synergy between the Village Government and the community is needed to maximize the potential of BUMDes in supporting sustainable economic development.

Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari. BUMDes Anugerah Mandiri berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada berbagai aspek peran Pemerintah Desa, seperti peran sebagai fasilitator dalam pembentukan BUMDes, pengelolaan aset desa, pemberian dukungan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, pengurus BUMDes, dan anggota masyarakat, serta observasi langsung terhadap operasional BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif Pemerintah Desa dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan kapasitas BUMDes berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti

keterbatasan sumber daya manusia dan permodalan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Indonesia memiliki harapan besar dalam memajukan kemanusiaan dan pendidikan, yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kemiskinan harus diatasi melalui pembangunan ekonomi dan pendidikan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan pada masyarakat tertentu, tetapi juga menyentuh wilayah perdesaan, yang menjadi fokus dalam dekade terakhir melalui pengelolaan yang baik dan perbaikan infrastruktur. Desa sebagai wilayah berpotensi, harus didorong menuju kemandirian dengan dukungan tata kelola yang memadai.¹ Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 78 ayat 1, menjadi kunci pengembangan potensi desa. Pemerintah desa perlu mendirikan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan ini mencakup pengembangan pasar, jaminan harga yang layak bagi petani, serta penyediaan infrastruktur yang memudahkan akses kegiatan usaha.²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi dan potensi desa. BUMDes tidak terbatas pada usaha jual-beli barang, tetapi mencakup berbagai sektor yang mendukung peningkatan ekonomi, serta kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat desa. Berdasarkan Permendagri No. 39, BUMDes sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa, termasuk aset dan inventarisnya, untuk meningkatkan kemandirian desa. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan, seperti UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendukung pendirian BUMDes. Fokusnya adalah mengatasi ketertinggalan desa dan memperkuat potensi ekonomi lokal, sehingga BUMDes dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan desa.

BUMDes dapat menjadi pondasi penting bagi desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai sarana yang mendukung permodalan dan perekonomian masyarakat, BUMDes diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan karena berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Prinsip BUMDes didasarkan pada pengembangan usaha yang berkelanjutan. Jika BUMDes dan desa mampu mencapai kemandirian, desa tidak akan lagi bergantung pada pendanaan pemerintah untuk pembangunan.³ Potensi desa meliputi berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kerajinan, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa juga memainkan peran penting dalam penyediaan sumber daya alam yang potensial bagi Indonesia.

Desa memiliki potensi besar yang, jika digali, dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pengembangan desa perlu terus ditingkatkan, karena sejak lama desa dikenal dengan semangat gotong-royong dan solidaritas yang kuat. Kemajuan desa perlu didukung oleh pemerintah dengan antusiasme penuh, mengingat potensi kesejahteraan desa yang dapat meningkat signifikan berkat semangat alami masyarakatnya.⁴ Masyarakat desa, sebagai bagian integral dari pembangunan, juga dapat berkontribusi melalui usaha di sektor informal

¹Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

²Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm .65.

³Zulkarnaen, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2016), hlm. 1.

⁴Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 4

yang berpotensi mengembangkan kreativitas dan keterampilan lokal. BUMDes, sebagai inisiatif masyarakat desa, menjadi sumber penghasilan melalui berbagai aktivitas ekonomi.

BUMDes berperan penting dalam memberikan layanan ekonomi yang menguntungkan, baik untuk kelangsungan usaha maupun bagi hasil yang dijalankan. Kegiatan BUMDes mendorong partisipasi masyarakat, misalnya melalui pemberian pinjaman dengan bunga ringan untuk membantu pengembangan usaha. Meskipun desa tidak mencari keuntungan besar, layanan ini memacu masyarakat untuk mendukung kemajuan usaha desa. Walaupun sektor perbankan sudah berkembang, banyak masyarakat desa yang tidak memiliki akses modal yang cukup besar. BUMDes menyediakan pinjaman kecil sesuai dengan kemampuan masyarakat.⁵ Namun, tantangan dalam pengelolaan BUMDes, seperti keterlambatan pembayaran pinjaman, menunjukkan pentingnya administrasi yang baik. BUMDes harus memiliki sistem yang tertib untuk memastikan pengelolaan dana dan pembayaran berjalan lancar demi meningkatkan tata kelola yang lebih baik.

Strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes akan berpengaruh pada besar kecil maupun cepat lamabatnya dalam proses aktifitas perekonomian dan pendapatan desa. Pengelolaan yang baik dari BUMDes juga dapat maksimal jika dilaksanakan dengan maksimal. Pada PP No. 72 Tahun 2005 dalam ketentuan Pasal 78 merupakan pedoman yang dipakai BUMDes dalam ketentuannya bahwa guna memberikan peningkatan pada pendapatan asli desa.⁶ Namun pada taraf kemandirian masyarakat atas pertumbuhan perekonomiannya merupakan dampak dari aktifitas layanan dan usaha-usaha dari dilaksanakannya usaha BUMDes sebagai aktifitas timbal balik yang dilakukan BUMDes kepada masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.⁷

Aset desa dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi yang dilakukan pada proses pertumbuhan perekonomian desa, peningkatan perekonomian ini dilakukan dengan cara: pengamatan lingkungan desa untuk dapat mengetahui potensi desa, pengamatan dilakukan untuk melaksanakan upaya dalam usaha yang akan berkembang melalui BUMDes. Strategi produksi, keuangan, dan penetapan harga. Kemudian, implementasi kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dalam pengembangan usaha-usaha yang telah direncanakan, selanjutnya dilakukan upaya peninjauan melalui evaluasi dan kontrol disebabkan karena harus adanya pemerhati usaha-usaha tersebut untuk dapat mengetahui seberapa jauh usaha yang dijalankan oleh BUMDes meningkat atau menurun, kewenangan yang diberikan merupakan peran dari kepala desa yang kewenangan untuk melakukan pengawasan dan tanggungjawab pada BUMDes di desa, kewenangan ini diberikan kepada kepala desa dari Kepala Daerah dimana terdapat koordinasi dalam memberikan kontribusi meningkatkan perekonomian dan pembangunan, serta penuntasan masalah kemiskinan dan daerah tertinggal di pedesaan pada saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini nantinya akan berfokus pada sejauhmana fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan ekonomi melalui BUMDes serta hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembangunan ekonomi melalui BUMDes Di Desa Mekar Sari.

Metode

Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi melalui

⁵Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers:2009), hlm.2

⁶ Pasal 78, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

⁷Jim Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi:Community Development*, terj. Sastrawan Manulang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 423.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan adanya eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang terjadi, serta memahami secara menyeluruh peran dan dinamika yang terlibat. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti perangkat desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan BUMDes, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur yang dilakukan untuk mengungkap peran Pemerintah Desa dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung terhadap operasional BUMDes untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas ekonomi desa, serta pengumpulan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan BUMDes.

Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari

Pembangunan dewasa ini ditujukan dalam aktifitas sosial yang ada di lingkungan masyarakat sehingga pembangunan memiliki dampak bukan hanya pada factor ekonomi namun juga pada lingkungan sekitar dan alam sebagai modal kesetaraan satu sama lain untuk perbaikan manusia dan lingkungan. Untuk mengembangkan pada arah pembangunan yang jelas maka harus berdasarkan penilaian lingkungan strategis, pemerintah kota harus peka terhadap beragam masalah sosial. Memperoleh pengetahuan hukum akan memungkinkan masyarakat untuk memilih mengikuti norma hukum atau peraturan untuk diindahkan dalam sebuah perilaku.

Salah satu strategi untuk melaksanakan pembangunan desa adalah dengan membentuk suatu badan usaha di tingkat desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan desa. Tahun 2018 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat bahwa telah ada sekitar 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) BUM Desa di Indonesia dari 74.958 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) desa yang ada di Indonesia. Namun, sejak sampai saat ini ditahun 2023 kementerian desa mencatat data BUM Des dan BUM Desa bersama antara lain:

Tabel 1.
Data BUMDes dan BUMDes Bersama

Kategori dan Jumlah			
BUMDes	Mendaftar nama (96)	Perbaikan nama (1.104)	Terverifikasi nama (27.170)
	Mendaftar badan hukum (496)	Perbaikan dokumen (5.834)	Sudah berbadan hukum (14.326)
BUMDes Bersama	Mendaftar nama (93)	Perbaikan nama (2.165)	Terverifikasi nama (1.227)
	Mendaftar badan hukum (134)	Perbaikan dokumen (216)	Sudah berbadan hukum (1.228)

Sumber: <https://bumdes.kemendesa.go.id>

Pemerintah Desa Mekar Sari memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugerah Mandiri. Ketua BUMDes Anugerah Mandiri menjelaskan bahwa peran utama BUMDes adalah menyediakan pinjaman modal bagi warga desa Mekar Sari yang membutuhkan, seperti untuk usaha perkebunan sawit, dengan sistem bagi hasil. Menurut responden, pemberian pinjaman ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan usaha dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa Mekar Sari secara keseluruhan.⁸

Selama periode 2018-2023, BUMDes telah melayani 39 peminjam atau nasabah. Salah satu dampak positif BUMDes adalah kemampuannya membantu masyarakat yang membutuhkan modal, baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun, ada juga dampak negatif, yaitu adanya persaingan antara BUMDes, yang memiliki pangkalan gas, dengan beberapa masyarakat yang juga memiliki pangkalan gas di sekitar Desa Mekar Sari. Meskipun persaingan ini bersifat positif, masyarakat merasa adanya kompetisi yang mempengaruhi mereka.⁹ Selain dari pinjaman sebagaimana disebutkan diatas bahwa, usaha-usaha yang dimiliki oleh BUMDes Anugerah mandiri di desa Mekar Sari, Responden menyebutkan bahwa: “untuk saat ini Bumdes Anugerah Mandiri mempunyai 3 usaha yaitu:¹⁰

- a. Brilink
- b. Pengutipan Sampah
- c. Pembiayaan Barang

Pendirian lembaga bisnis merupakan bagaian dari berinvestasi atau penanaman modal, ada faktor penting yang perlu diperhatikan jika seseorang atau badan yang akan melakukan investasi atau penanaman di suatu daerah antara lain:¹¹

- a. Adanya kepastian hukum;
- b. Ada Stabilitas Politik;
- c. Adanya stabilitas perekonomian;
- d. Adanya stabilitas keamanan;
- e. Adanya sumber daya manusia;
- f. Adanya sumber daya alam;
- g. Dukungan sosial budaya masyarakat setempat.

BUMDes tidak akan efektif tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Desa Mekar Sari. Dalam pelaksanaan BUMDes Anugerah Mandiri, pemerintah desa berupaya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan modal yang telah diberikan secara optimal. Tujuan dari upaya ini adalah agar modal tersebut dapat digunakan sebaik mungkin untuk mendukung perekonomian masyarakat.¹² Pembangunan ekonomi desa tidak dapat terwujud tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui modal yang disediakan oleh pemerintah desa, desa dapat berkembang, dan masyarakat dapat mencapai kemandirian melalui usaha-usaha yang didukung oleh BUMDes Anugerah Mandiri

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Amran Sinaga selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Mekar Sari, Sabtu 27 mei 2023

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹Johni Emirzon, dkk. *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisini Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 2

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Amran Sinaga selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Mekar Sari, Sabtu 27 mei 2023

di Desa Mekar Sari. Ada beberapa pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi:¹³

- a. Pendekatan yang mengasumsikan bahwa pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sumber daya lebih banyak dikuasai oleh pihak luar, seperti pendekatan pasif, pelatihan, dan informasi. Ini menciptakan hubungan vertikal antara masyarakat dan pihak luar melalui komunikasi satu arah.
- b. Menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi lebih dekat dengan pejabat luar melalui pelatihan dan kunjungan, dikenal sebagai metode "partisipasi aktif".
- c. Metode partisipatif yang memberi masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan keputusan dan tanggung jawab atas kegiatan tertentu.
- d. Strategi yang melibatkan keterlibatan lokal dan mengandalkan keputusan yang dibuat oleh lingkungan sekitar dalam upaya pembangunan.

Program pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Mekar Sari mencakup rencana untuk BUMDes Anugerah Mandiri yang akan bekerja sama dengan pihak desa dalam usaha peternakan kambing. Program ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi warga Desa Mekar Sari, dan hasil dari usaha peternakan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat desa.

Masyarakat sebagai satu kesatuan dengan wilayah desa memiliki peran untuk berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan terwujudnya pemerintahan yang maju dan berkembang dalam pembangunan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat pada masing-masing usaha guna mencapai kesejahteraan. Hal yang paling potensial adalah memberikan kontribusi untuk peningkatan asli pendapatan desa dan taraf hidup masyarakat desa. tidak dapat dipungiri merupakan perpaduan antara peran pemerintah desa/masyarakat.¹⁴

Terhadap program BUMDes yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa, menunjukkan berbagai tanggapan dari kalangan Masyarakat Desa Mekar Sari. Untuk memberikan gambaran atas tanggapan-tanggapan masyarakat Desa Mekar Sari, ruang lingkup pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner, diantaranya : tanggapan masyarakat desa dengan adanya usaha-usaha yang dibuat oleh pemerintah desa melalui BUMDes, manfaat yang dirasakan masyarakat, layanan keuangan, layanan pembiayaan barang, layanan kebersihan, dan harapan masyarakat terhadap BUMDes Anugerah Mandiri. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat dengan adanya usaha-usaha yang dibuat oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes, diuraikan menggunakan sistem acak yang paling relevan serta paling mewakili yang akan diuraikan dibawah ini.

Masyarakat menanggapi dengan adanya BUMDes Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari terkait usaha-usaha yang dibuat oleh Pemerintah Desa, menurut Responden:

Dengan adanya Bumdes di desa ini terutama di desa mekar sari sedikit banyak sudah bisa membantu para warga, yang sebelumnya cukup di bilang sulit dalam mengakses layanan tertentu.¹⁵ kami ucapkan terima kasih kepada bapak kepala desa, adanya bumdes di desa ini masyarakat sangat senang dan terbantu, mereka dapat menggunakan usaha yang dibuat pemdes dengan gembira.¹⁶

¹³Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 31.

¹⁴Lukman Hakim, Irene Scinarky, dkk. *BUM Desa sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan untuk Desa di Indonesia)*. (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm 815

¹⁵Hasil Kuisisioner, Tanggapan Bapak Zulham selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mekar Sari

¹⁶Hasil Kuisisioner, Tanggapan Dimas selaku Mahasiswa yang tinggal di Desa Mekar Sari

Tanggapan masyarakat terkait manfaat yang dirasakan melalui usaha-usaha yang dilakukan BUMDes Anugerah Mandiri, menurut beberapa Responden di Desa Mekar Sari:

Sangat merasa terbantu, karena adanya usaha tersebut masyarakat di desa ini menjadi lebih maju¹⁷ Kami merasa sangat dibantu dengan adanya usaha-usaha yang dibuat pemerintah desa yang sebelumnya cukup sulit kami gunakan.¹⁸

Tanggapan masyarakat terkait dengan manfaat layanan keuangan yang merupakan usaha BUMDes Anugerah di Desa Mekar Sari:

Kami sangat mudah untuk mengirimkan uang dan menarik uang tanpa harus pergi ke kota, sebab sebelumnya warga disini ketika ingin mengambil atau mengirim uang mereka harus pergi ke kota untuk mendapatkannya¹⁹ Kami dapat mengirimkan uang kepada anak kami yang jauh di kota, dengan sangat mudah, karena sebelumnya kami untuk mengirim harus pergi ke kota dulu.²⁰

Tanggapan masyarakat terkait manfaat melalui layanan pembiayaan barang yang merupakan usaha BUMDes Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari:

Bagi kami, adanya layanan ini cukup membantu, sebab ketika kami ingin memiliki suatu barang dan belum mempunyai cukup uang, maka adanya pembiayaan barang kami dapat memiliki barang yang kami inginkan dan dengan pembayaran secara bertahap atau di cicil.²¹ Masyarakat dapat membeli suatu barang lebih mudah, dan pembayarannya cukup membantu melalui beberapa tahapan, agar masyarakat dapat membayarnya dengan secara bertahap.²²

Tanggapan masyarakat terhadap layanan kebersihan yang merupakan layanan kebersihan oleh BUMDes Anugerah Mandiri:

Desa ini menjadi bersih, juga sejuk karena petugas kebersihan yang selalu menjaga kebersihan di desa ini, dan memberikan tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya.²³ Masyarakat merasakan terbantu dengan adanya petugas kebersihan, yang memiliki tugas untuk mengatur pembuangan sampah secara rutin, agar terhindar dari penumpukan sampah.²⁴

Tanggapan masyarakat terkait dengan harapan kedepannya untuk BUMDes Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari:

Kami masyarakat desa mekar sari, berharap agar program bumdes ini ketika berhenti masa jabatan kepala desa, tidak berhenti juga, akan tetapi ketika pergantian kepala desa, juga meneruskan program-program ini, bahkan lebih bagus membuat program sesuai dengan perkembangan yang ada di kota-kota.²⁵ Semoga

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Amran Sinaga selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Mekar Sari, Sabtu 27 mei 2023

¹⁸ Hasil Kuisisioner, Ibu Sarinah Manurung selaku Ibu Rumah tangga di Desa Mekar Sari

¹⁹ Hasil Kuisisioner, Bapak Paijo selaku Petani di Desa Mekar Sari

²⁰ Hasil Kuisisioner, Ibu Marina selaku Ibu Rumah Tangga di Desa Mekar Sari

²¹ Hasil Kuisisioner, Bapak Damare selaku Pedagang di Desa Mekar Sari

²² Hasil Kuisisioner, Bapak Sumanto selaku Pedagang di Desa Mekar Sari

²³ Hasil Kuisisioner, Irvan selaku mahasiswa yang tinggal di Desa Mekar Sari

²⁴ Hasil Kuisisioner, Tanggapan Bapak Zulham selaku Tokoh Masyarakat di Desa Mekar Sari

²⁵ Hasil Kuisisioner, Tanggapan Ayu Anggraini selaku mahasiswa yang tinggal di Desa Mekar Sari

*pemerintah desa dapat menjalankan seterusnya program-program seperti ini, yang sangat dirasakan masyarakat.*²⁶

Berdasarkan tanggapan masyarakat mengenai BUMDes Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari, antusiasme dan dukungan terhadap inisiatif ini sangat tinggi. Ketua BUMDes Anugerah Mandiri menyatakan bahwa masyarakat merespons positif keberadaan BUMDes dan usaha-usahanya. Mereka mengapresiasi upaya BUMDes dalam membuka lapangan kerja dan menyediakan pinjaman modal yang memudahkan mereka dalam memulai usaha kecil. Masyarakat berharap agar modal yang disediakan dapat ditingkatkan dan jangka waktunya diperpanjang untuk mendukung kelancaran usaha mereka. Selain itu, BUMDes telah memberikan manfaat nyata bagi warga, seperti memfasilitasi transaksi pembayaran listrik, menyediakan layanan pengumpulan sampah untuk mencegah penyakit, dan menawarkan pembiayaan barang yang memudahkan pembelian tanpa harus bergantung pada pinjaman rentenir.

Hambatan terhadap pembangunan perekonomian Badan Usaha Milik Desa Anugerah mandiri di Desa Mekar Sari

Dapat dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Tebih Mandiri tidak mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa sebagai akibat dari penolakan Pemerintah Desa untuk memberikan kewenangan yang dibutuhkan Badan Usaha Milik Desa untuk memperluas usaha dan mengelola kekayaan perkebunan Desa. Selain itu, karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengelola, manajemen Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari kurang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan pengelolaan lahan perkebunan desa guna menggerakkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari masyarakat desa.

Menurut Suryanto bahwa, permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes karena belum adanya persiapan secara konkret mengani pola ekonomi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pada Desa tersebut, sumber daya manusia yang terbatas, keadaan desa yang kurang mendukung, pemerintah Desa yang belum optimal dalam memberikan dukungan kepada BUMDes, permodalan yang terbatas, dan sistem perencanaan keuangan dan akuntabilitas publik yang belum memadai.²⁷ Kepemimpinan, manajemen, dan tata kelola BUM Desa Mekar Sari tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena direktur kurang memiliki kualifikasi dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola BUM Desa, serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia dan pengetahuan manajemen yang diperlukan. Untuk memahami apa yang diperlukan oleh kepemimpinan, manajemen, dan tata kelola yang baik, serta kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen dan pengalaman dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik.

BUMDes di Desa Mekar Sari menghadapi sejumlah hambatan dalam upaya pembangunan ekonomi desa. Salah satu tantangan utama yang dilaporkan adalah ketidakmampuan BUMDes untuk memenuhi tingginya permintaan permodalan dari masyarakat. Meskipun antusiasme masyarakat untuk meminjam modal sangat tinggi, BUMDes sering kali tidak dapat menyediakan jumlah dana yang dibutuhkan karena keterbatasan sumber daya. Selain itu, beberapa peminjam pembiayaan barang terkadang

²⁶ Hasil Kuisioner, Tanggapan Bapak Fikri selaku Karyawan Swasta di Desa Mekar Sari

²⁷ Aan Sopanah, Reny Kurniawati, Dwi Anggarani. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*. (Surabaya: Scopindo Media Pusataka, 2023), hlm 73

mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, menyebabkan modal yang telah diberikan menjadi terjebak dan tidak dapat digunakan secara optimal.²⁸

Permasalahan lain yang dihadapi BUMDes muncul akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi telah memperburuk keadaan, membuat masyarakat sulit mengelola perekonomian mereka dan mengakibatkan modal usaha yang telah diberikan terhambat dalam perputarannya. Beberapa usaha UMKM juga mengalami penurunan signifikan atau bahkan gulung tikar karena pembatasan aktivitas selama pandemi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun BUMDes berusaha keras untuk mendukung perekonomian desa, faktor eksternal seperti krisis kesehatan global dapat mengganggu kelancaran operasional dan dampak positif yang diharapkan.²⁹ Pembangunan ekonomi di Desa Mekar Sari menghadapi berbagai hambatan meskipun BUMDes sudah ada sebelum adanya peraturan khusus. Beberapa masalah utama meliputi:

- a. Kerjasama. BUMDes Mekar Sari hanya menjalankan satu unit usaha, yaitu perusahaan simpan pinjam, sehingga tidak dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dan kesulitan dalam mengembangkan usaha baru karena kekurangan dana.
- b. Skala dan Jangkauan Usaha. BUMDes saat ini hanya fokus pada industri simpan pinjam dan belum mampu mengembangkan usaha tambahan seperti penyediaan jasa transportasi dan perkebunan, yang menghambat pemanfaatan potensi desa.
- c. Emansipasi Lokal. BUMDes tidak sepenuhnya mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan BUMDes melalui musyawarah desa seharusnya dapat meningkatkan efektivitasnya.
- d. Tradisi Berdesa. Tradisi gotong royong dan kekeluargaan yang mendukung pembangunan di desa sudah memudar di Mekar Sari. Proyek pembangunan sering kali dijadikan ajang untuk kepentingan pribadi, menghilangkan kepercayaan dan dukungan masyarakat.
- e. Dukungan Supra Desa. Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting untuk meningkatkan permodalan dan pengelolaan BUMDes. Bantuan yang diberikan seringkali bertahap, menghambat perkembangan usaha BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa.

Masalah-masalah di atas menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen, dukungan, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas BUMDes dalam memajukan ekonomi desa.

Kesimpulan

Peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi melalui BUMDes Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari mencakup penerapan peraturan yang relevan untuk memperbaiki perekonomian lokal. BUMDes, yang diinisiasi oleh pemerintah desa, menyediakan layanan seperti pinjaman permodalan, pembiayaan barang, dan layanan kebersihan guna mendukung usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. Partisipasi masyarakat sebagai nasabah penting untuk memutar modal, memperkuat usaha, dan melindungi aset desa. Program-program BUMDes memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan ekonomi desa.

Namun, pengembangan BUMDes Anugerah Mandiri menghadapi beberapa masalah, yaitu: (a) kurangnya pengalaman dan pendidikan manajerial direktur dalam kepemimpinan dan tata kelola; (b) operasi terbatas pada satu unit usaha tanpa adanya kemitraan; (c)

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Amran Sinaga selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Mekar Sari, Sabtu 27 Mei 2023

²⁹*Ibid*

pendirian yang tidak mengedepankan semangat emansipasi lokal; (d) kurangnya tradisi desa dan solidaritas masyarakat; (e) minimnya dukungan dari pihak eksternal desa.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Balilatfo, *BUMDES: Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta: Kemendes PDPT, 2019.
- Aan Sopanah, Reny Kurniawati, Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*, Surabaya: Scopindo Media Pusataka, 2023.
- Johni Emirzon, dkk. *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Lukman Hakim, Irene Scinarky, *BUM Desa sebagai Kekuatan Ekonomi Baru (Sebuah Gagasan untuk Desa di Indonesia)*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes: Sektor wisata, Bisnis/Serving, Sektor Keuangan/Ekonomi, Bisnis Penyewaan, Sektor Perdagangan, Pertanian dan Perkebunan*, Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020

2. Jurnal

- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3), hlm 61-72
- Irwan, Bahmid, Junindra Martua. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 2 Mei, hlm 235-241
- Junindra Martua, Rahmat, Mangaraja Manurung, Zaid Afif. (2019). Mengoptimalkan Peran Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Mitra Kepala Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1 No.2
- Norma Novita Aritonang, Emiel Salim Siregar. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Surat Domisili Yang dikeluarkan Oleh Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Kepala Desa Padang Sari Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan). *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 3, No. 1 November
- Salim Fauzi Lubis, Siti Suryana Harahap. (2023). Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara. *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1, Februari, hlm 81-90
- Zaid Afif, Khomaidi Hambali, Eka Sajali, (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik. *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1, Februari, hlm 21-30
- Zulkarnaen, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, Bandung: Universitas Padjajaran, 2016.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa